

BAB II

KAJIAN KONSEPTUAL

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi sumber yang di jadikan acuan ataupun pertimbangan oleh peneliti yang berkaitan dengan fokus penelitian yang di lakukan. Di antaranya sebagai berikut :

1. Suci Rohmatia Filzah (2021) “Efektivitas Pelaksanaan Program Sembako di Desa Pakulaut Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal” Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung.

Penelitian ini merujuk pada efektivitas pelaksanaan program Sembako di Desa Pakulaut Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran secara empiris mengenai aspek efektivitas. Metode yang digunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Populasi berjumlah 600 KPM program Sembako dan sampel 86 Responden. Teknik penarikan sampel menggunakan *probability sampling* dengan teknik *Proportioned area random sampling*. Teknik pengumpulan data menggunakan angket dan studi dokumentasi. Adapun uji validitas alat ukur menggunakan validitas konstruksi (*construct validity*). Uji reliabilitas menggunakan metode *Cronbach Alpha*. Selanjutnya hasil penelitian dianalisis menggunakan analisis kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan efektivitas pelaksanaan program sembako sudah cukup efektif dengan usulan

program “Peningkatan Kapasitas bagi Pendamping dan Petugas Pelaksana Program Sembako di Desa Pakulaut Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal.”

2. Istiharoh (2021) “Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kelurahan Terkul Kecamatan Rupert” Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program Bantuan Pangan Non tunai. Penelitian ini menggunakan teori pengukuran efektivitas dari Makmur. Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Berdasarkan penyebaran angket yang peneliti lakukan, wawancara dan juga observasi dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program Bantuan Pangan Non tunai di Kelurahan Terkul Kecamatan Rupert masih dikategorikan sangat tidak efektif.

3. Karmila (2022) “Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa” Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa. Jenis penelitian kualitatif bertujuan untuk mengetahui efektivitas Program BPNT. berdasarkan permasalahan yang terjadi di lokasi penelitian. Informan dalam penelitian ini berjumlah 10 orang. Pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dan penarikan kesimpulan, sedangkan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber, teknik dan waktu.

4. Achmad Rosihin (2022) “Kontrol Sosial Masyarakat Terhadap Pemanfaatan Program Sembako Oleh Keluarga Penerima Manfaat di Desa Geblug Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen” Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kontrol sosial dalam proses pemanfaatan program sembako oleh keluarga penerima manfaat di Desa Geblug Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen yang meliputi aspek mendidik, membujuk dan memaksa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Informan dalam penelitian ini yaitu lima orang yang terdiri dari tiga informan dari pemerintahan desa, satu informan dari masyarakat umum, satu dari informan dari pengurus Tim Penggerak PKK. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kontrol sosial dalam pemanfaatan program sembako di Desa Geblug telah dijalankan dengan baik.

5. Wiwit (2020) “Monitoring Dan Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Batu” Universitas Muhammadiyah Malang

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Permasalahan pada program pemerintah dalam pemberian bantuan sosial pada masyarakat miskin yang belum tepat. Metode dalam penelitian ini menggunakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif, memberikan gambaran perkembangan dalam penerapan program BPNT dalam penanggulangan kemiskinan. Teknik pengumpulan data

dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan pada pelaksanaan monitoring dan evaluasi Program BPNT di kota Batu telah menerapkan prinsip-prinsip monitoring dan evaluasi dan telah berjalan dengan cukup baik yang dilakukan oleh pendamping BSP dan program BPNT dinilai telah tepat sasaran, sehingga dapat mempercepat pelaksanaan penanggulangan kemiskinan. Program BPNT telah diberikan kepada KPM Kota Batu sebanyak 5.649 KPM pada Tahun 2018 kemudian mengalami penurunan pada Tahun 2019 yaitu sebanyak 3.992 KPM. Faktor penghambat dalam monitoring dan evaluasi program BPNT yaitu pertama kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) kedua yaitu waktu.

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Persamaan dan Perbedaan
1	2	3	4
1.	Suci Rohmatia Filzah (2021)	Efektivitas Pelaksanaan Program Sembako di Desa Pakulaut Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal	Persamaan Variabel, Metode dan Pendekatan. Perbedaan di lokasi penelitian.
2.	Istiharoh (2021)	Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kelurahan Terkul Kecamatan Rupert.	Persamaan Variabel, Metode dan Pendekatan. Perbedaan di Lokasi Penelitian.
3.	Karmila (2022)	Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa.	Persamaan di Variabel dan Metode. Perbedaan di Pendekatan dan Lokasi Penelitian

1	2	3	4
4.	Achmad Rosihin (2022)	Kontrol Sosial Masyarakat Terhadap Pemanfaatan Program Sembako Oleh Keluarga Penerima Manfaat di Desa Geblug Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen.	Persamaan di Metode. Perbedaan di Pendekatan dan Lokasi Penelitian.
5.	Wiwit (2020)	Monitoring Dan Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Batu.	Persamaan Subjek dan Metode. Perbedaan Variabel, Pendekatan dan Lokasi Penelitian.

Sumber : Hasil Penelitian 2023

Tabel 2.1 menjelaskan mengenai hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti-peneliti lain, peneliti menarik kesimpulan tentang perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian akan dilakukan didasarkan pada perspektif pekerjaan sosial dan lebih memfokuskan pada efektivitas pelaksanaan program bantuan pangan non tunai di Kelurahan Cibeunying Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung.

Pada penelitian ini menggunakan 4 (empat) aspek yaitu ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program dan pemantauan program. Kemudian responden dalam penelitian ini adalah keluarga miskin penerima manfaat Program BPNT yang ada di Kelurahan Cibeunying Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung. Walaupun dengan variabel yang sama, hasil penelitian dimungkinkan karena karakteristik responden yang berbeda di setiap daerah.

2.2 Tinjauan Teori Efektivitas

Teori yang relevan dengan penelitian ini terdiri dari teori mengenai efektivitas, program bantuan pangan non tunai (BPNT), kemiskinan dan praktik pekerjaan sosial dalam kemiskinan.

2.2.1 Definisi Efektivitas

Menurut Subagyo dalam Budiani (2009) Efektivitas adalah kesesuaian antara *output* dengan tujuan yang ditetapkan. Efektivitas adalah suatu keadaan yang terjadi karena dikehendaki. Sedangkan menurut Richard Steer dalam Halim (2001), efektivitas harus dinilai atas dasar tujuan yang bisa dilaksanakan, bukan atas dasar konsep tujuan yang maksimum.

Berdasarkan pendapat dari beberapa para ahli di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa efektivitas merupakan keadaan yang digunakan sebagai alat untuk mengetahui keberhasilan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu target. Efektif atau tidaknya suatu kegiatan dapat dilihat dari hasil akhir suatu kegiatan, sedangkan efektivitas program adalah tingkat perwujudan dari perumusan tujuan yang ditentukan oleh suatu kelompok, di mana di dalamnya terdapat tugas-tugas pokok. Jadi Efektif atau tidaknya dapat dilihat dari salah satunya pemanfaatan bantuan dan sasaran bantuan tersebut apakah sudah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam sebuah aturan program tersebut.

2.2.2 Aspek Efektivitas

Efektivitas dari suatu program ataupun kegiatan yang dilakukan dilihat berdasarkan kesesuaian antara tujuan dan realisasi program yang dilaksanakan. Untuk mengukur efektivitas dapat dilakukan menggunakan berbagai aspek/indikator berdasarkan konsep dan teori yang ada. Efektivitas tersebut dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, tergantung dari pada siapa yang menilai dan menafsirkannya. Menurut Budiani (2009:53) menyatakan bahwa untuk mengukur efektivitas program dapat dilakukan dengan menggunakan aspek-aspek sebagai berikut:

1. Ketepatan Sasaran Program, program yang telah dilaksanakan harus ditujukan kepada sasaran yang tepat sesuai dengan kriteria peserta program yang telah ditetapkan, sehingga pelaksanaan program dapat berjalan dengan efektif.
2. Sosialisasi Program, sosialisasi ini dapat berkaitan dengan sejauh mana *stakeholder* atau pemangku kepentingan dan kelompok kepentingan lainnya mengetahui, memahami dan memberikan sosialisasi atau proses pemahaman kepada masyarakat terkait program.
3. Tujuan Program, sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sehingga keefektifan suatu program dapat diukur dengan tujuan program yang telah ditetapkan.
4. Pemantauan Program, berupa evaluasi yang dapat diukur dengan sejauh mana suatu program memberikan efek atau dampak terhadap

perubahan yang nyata bagi masyarakat peserta program serta pelaksanaan program harus sesuai dengan waktu dan tujuannya.

2.2.3 Kriteria Efektivitas

Menurut Makmur (2011:7) efektivitas dapat dilihat dari beberapa kriteria sebagai berikut:

1. Ketepatan penentu waktu : Waktu merupakan sesuatu yang dapat menentukan keberhasilan suatu organisasi yang dilakukan dalam sebuah organisasi. Penggunaan waktu yang tepat akan menciptakan efektivitas dalam pencapaian tujuan.
2. Ketepatan perhitungan biaya : Berkaitan dengan ketepatan pemanfaatan biaya, tidak mengalami kekurangan juga sebaliknya tidak mengalami kelebihan biaya sampai kegiatan dapat dilaksanakan dan diselesaikan dengan baik.
3. Ketepatan dalam pengukuran : Ketepatan dalam ukuran yang dipergunakan dalam melakukan suatu kegiatan maupun tugas.
4. Ketepatan dalam menentukan pilihan : Ketepatan dalam menentukan memilih suatu kebutuhan atau keinginan merupakan tindakan yang dilakukan agar mendapat keefektivan.
5. Ketepatan berpikir : Ketepatan berpikir akan melahirkan keefektivan, sehingga kesuksesan yang senantiasa diharapkan melalui tenaga kerja yang menjalankan tugas dengan baik melakukan suatu bentuk kerjasama yang dapat memberikan hasil yang maksimal.

6. Ketepatan dalam melakukan perintah : Keberhasilan aktivitas organisasi dipengaruhi oleh seorang pemimpin, salah satunya memberikan perintah yang jelas dan mudah dipahami.
7. Ketepatan tujuan : Ketepatan tujuan merupakan aktivitas organisasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan yang ditetapkan secara tepat, akan sangat menunjang efektivitas pelaksanaan kegiatan terutama yang berorientasi kepada jangka panjang.
8. Ketepatan sasaran : Penentuan sasaran yang tepat baik. Sasaran yang kurang tepat, akan menghambat pelaksanaan berbagai kegiatan itu sendiri.

2.2.1 Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas

Siagian dalam Utari Wulandari H. Jhon Simon (2019:5) turut mengemukakan faktor yang mempengaruhi efektivitas program yaitu sebagai berikut :

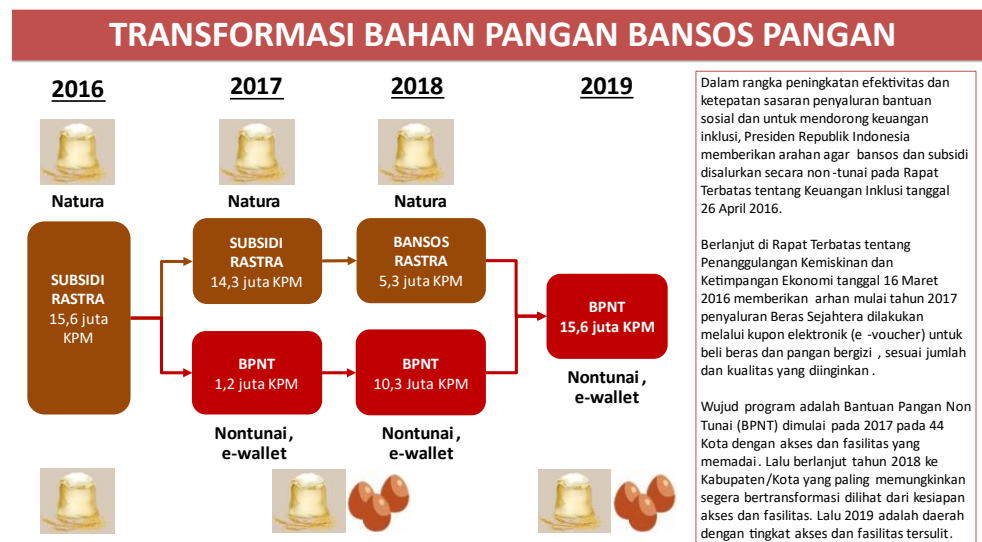
1. Karakteristik Organisasi
2. Karakteristik Lingkungan
3. Karakteristik Pekerja
4. Karakteristik Kebijakan dan Praktek Manajemen

2.3 Tinjauan Teori Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Berdasarkan Pedoman Umum Sembako (2020) Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) diuraikan sebagai berikut :

2.3.1 Pengertian Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Program bantuan sosial pangan sebelumnya merupakan Subsidi Rastra, dan mulai ditransformasikan menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada 2017 di 44 kota terpilih. Selanjutnya, pada tahun 2018 program Subsidi Rastra secara menyeluruh ditransformasi menjadi program Bantuan Sosial Pangan yang disalurkan melalui skema non tunai dan Bansos Rastra. Pada akhir tahun 2019, program Bantuan Sosial Pangan di seluruh kabupaten/kota dilaksanakan dengan skema non tunai atau BPNT. Program BPNT merupakan upaya pemerintah untuk mentransformasikan bentuk bantuan menjadi non tunai (*cashless*) yakni melalui penggunaan



kartu elektronik yang diberikan langsung kepada KPM. Bantuan sosial tersebut disalurkan kepada KPM dengan menggunakan sistem perbankan, yang kemudian dapat digunakan untuk memperoleh beras dan/atau telur di e-Warong, sehingga KPM juga memperoleh gizi yang lebih seimbang.

Gambar 2. 1 Transformasi Bahan Pangan Bansos Pangan

Sumber : PPT Sekretariat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial 2022

Gambar 2.1 menunjukkan transformasi bagaimana transformasi sejarah Program bantuan dari tahun 2016 hingga 2019 dalam rangka peningkatan efektivitas dalam penyaluran bantuan sosial. Selain itu, program ini memperluas jenis komoditas yang dapat dibeli ini sebagai upaya dari Pemerintah untuk memberikan akses KPM terhadap bahan pokok dengan kandungan gizi lainnya. Di sisi lain, pengembangan jenis bahan pangan yang didapatkan dari program ini akan mampu meningkatkan nutrisi/gizi masyarakat, terutama anak-anak sejak dini sehingga akan memiliki pengaruh terhadap penurunan *stunting*.



Gambar 2. 2 Tahap Target Perluasan KPM

Sumber : PPT Sekretariat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial 2022

Gambar 2.2 menunjukkan dalam transformasi Bantuan Sosial Pangan sejak tahun 2017 sampai dengan 2018 terdapat perluasan dalam penerima manfaat guna meningkatkan penyaluran menjadi lebih banyak dari 44 kota menjadi 165 kota/kabupaten.

2.3.2 Dasar Hukum Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Dasar hukum Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non tunai.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik.
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga.
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/ PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga.
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional.
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

2.3.3 Tujuan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Tujuan program Bantuan Pangan Non tunai (BPNT) adalah sebagai berikut:

1. Mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan;
2. Memberikan gizi yang lebih seimbang kepada KPM;
3. Meningkatkan ketepatan sasaran, waktu, jumlah, harga, kualitas, dan administrasi; dan
4. Memberikan pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan.

2.3.4 Manfaat Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Manfaat program ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya ketahanan pangan di tingkat KPM sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
2. Meningkatnya efisiensi penyaluran bantuan sosial;
3. Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan perbankan;
4. Meningkatnya transaksi non tunai dalam agenda Gerakan Nasional Non tunai (GNNT); dan

5. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan.
6. Dalam jangka panjang mencegah terjadinya *stunting* dengan pemenuhan gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

2.3.5 Prinsip Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Berikut Prinsip dalam pelaksanaan Program BPNT :

1. Mudah dijangkau dan digunakan oleh KPM.
2. Memberikan pilihan dan kendali kepada KPM untuk menentukan jumlah, jenis, kualitas, dan harga bahan pangan (beras dan/atau telur) serta tempat membeli (KPM tidak diarahkan pada e-Warong tertentu dan e-Warong tidak memaketkan bahan pangan yang menyebabkan KPM tidak mempunyai pilihan dan kendali terhadap jenis bahan pangan);
3. Mendorong usaha eceran rakyat untuk memperoleh pelanggan dan peningkatan penghasilan dengan melayani KPM;
4. Memberikan akses jasa keuangan kepada usaha eceran rakyat dan kepada KPM.
5. E-warong dapat membeli pasokan bahan pangan dari berbagai sumber sehingga terdapat ruang alternatif pasokan yang lebih optimal.
6. Bank Penyalur bertugas menyalurkan dana bantuan ke rekening KPM dan tidak bertugas menyalurkan bahan pangan kepada KPM, termasuk tidak melakukan pemesanan bahan pangan.

2.3.6 Mekanisme Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Mekanisme pelaksanaan program ini terbagi menjadi lima tahap yang diuraikan sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan dilakukan dengan menyiapkan jumlah KPM program sembako kabupaten/kota beserta data penerima manfaat yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Untuk daerah yang tidak melakukan verifikasi dan validasi data, maka data KPM yang akan digunakan adalah data yang ada di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola Kementerian Sosial. Tahap ini juga dilakukan penyiapan e-warong (penyalur program sembako) oleh bank dilakukan dengan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan di dalam Pedoman Umum Program Sembako 2020.

2. Tahap Sosialisasi dan Edukasi

Sosialisasi dan edukasi dilaksanakan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya KPM mengenai tujuan, mekanisme pemanfaatan, dan saluran pengaduan program sembako serta memberikan pemahaman KPM tentang pentingnya pemenuhan gizi yang seimbang untuk mencegah *stunting*. Pelaksana edukasi program sembako antara lain mencakup tim koordinasi bansos pangan pusat

atau provinsi, kabupaten maupun kota, pendamping sosial, aparatur daerah, serta bank penyalur. Pelaksanaan edukasi ini menggunakan berbagai media seperti rapat koordinasi, pedoman umum dan petunjuk teknis serta poster/brosur. Sasaran sosialisasi dan edukasi program sembako yaitu mencakup tim koordinasi bansos pangan pusat atau provinsi atau kabupaten/kota, pendamping sosial, aparat desa, KPM, dan e-warong.

3. Tahap Registrasi/Distribusi KKS

Tahap ini dilakukan oleh bank penyalur untuk registrasi atau pembukaan rekening secara kolektif berdasarkan data KPM yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Bank dibantu oleh pemerintah kabupaten/kota dan pendamping sosial melaksanakan distribusi KKS dan kelengkapannya kepada KPM yang telah dibukakan rekeningnya. Bank juga memberikan informasi kepada KPM mengenai lokasi e-warong yang dapat diakses dan meminta KPM untuk melakukan pengecekan kuota KKS di e-warong.

4. Tahap Penyaluran

Tahap penyaluran yaitu transfer dana bantuan program sembako ke rekening KPM di jadwalkan paling lambat pada tanggal 25 setiap bulannya.

5. Tahap Pemanfaatan

Tahap pemanfaatan yaitu tahap pembelian bahan pangan yang dilakukan oleh KPM pada e-warong yang telah disediakan

menggunakan KKS. KPM berhak menentukan jenis dan jumlah bahan pangan yang akan dibeli sesuai dengan ketentuan program sembako. KPM harus memanfaatkan seluruh dana bantuan program sembako yang diterimanya dengan baik.

2.4 Tinjauan Teori Kemiskinan

2.4.1 Pengertian Kemiskinan

Menurut Piven dan Cloward (1993) dan Swanson dalam Edi Suharto (2001), menunjukkan bahwa kemiskinan berhubungan dengan kekurangan materi, rendahnya penghasilan dan kesulitan memenuhi kebutuhan sosial. Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004, kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Dengan demikian, kemiskinan pada hakikatnya menunjuk pada situasi kesengsaraan dan ketidakpercayaan yang dialami seseorang baik akibat ketidakmampuannya dalam memenuhi kebutuhan hidup, maupun akibat ketidakmampuan negara atau masyarakat memberikan perlindungan sosial kepada warganya.

2.4.2 Kriteria Kemiskinan

Berdasarkan Studi SMERU dalam Edi Suharto (2013:16) menunjukkan sembilan kriteria yang menandai kemiskinan:

1. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (pangan, sandang dan papan).
2. Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental.
3. Ketidakmampuan dan ketidakberfungsian sosial (anak terlantar, wanita korban tindak kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marginal dan terpencil)
4. Rendahnya kualitas sumber daya manusia (buta huruf, rendahnya pendidikan dan keterampilan, sakit-sakitan) dan keterbatasan sumber daya alam.
5. Kerentanan terhadap guncangan yang bersifat massal.
6. Ketiadaan akses terhadap lapangan pekerjaan dan mata pencaharian yang memadai dan berkesinambungan.
7. Ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi dll)
8. Ketiadaan jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga tidak adanya perlindungan sosial dari negara dan masyarakat)
9. Ketidakterlibatan dalam kegiatan sosial masyarakat.

2.4.3 Faktor Penyebab Kemiskinan

Dalam Edi Suharto (2013:18) secara konseptual kemiskinan bisa di akibatkan oleh empat faktor, yaitu :

1. Faktor Individual, faktor ini terkait dengan aspek patologis, termasuk kondisi fisik dan psikologis dari orang yang tergolong miskin. Hal ini

disebabkan karena perilaku, pilihan, atau kemampuan dari diri orang miskin itu sendiri dalam menghadapi kehidupannya.

2. Faktor Sosial, faktor ini terkait dengan kondisi lingkungan sosial yang menjebak seseorang menjadi miskin. Sebagai contoh adalah diskriminasi berdasarkan usia, etnis, suku, agama yang memuat seseorang tersebut menjadi miskin.
3. Faktor Kultural, faktor ini terkait dengan kondisi atau kualitas budaya yang menyebabkan kemiskinan. Hal ini sering merujuk pada budaya kemiskinan yang ada dalam masyarakat. Sikap-sikap seperti malas, tidak ingin berusaha, kurang menghormati etos kerja, mudah menyerah, tidak memiliki kepedulian, dan lain sebagainya. Hal-hal demikian sering kali ditemukan pada diri orang-orang yang tergolong kurang mampu.
4. Faktor Struktural, faktor ini menunjuk pada struktur atau sistem yang tidak adil, tidak berpihak, tidak sensitif, atau tidak akses sehingga menyebabkan seseorang atau sekelompok orang menjadi miskin. Sebagai contoh adalah kebijakan atau program yang kurang tepat dan tidak berpihak pada sekelompok orang sehingga menyebabkan terjadinya kemiskinan.

2.4.4 Program Penanggulangan Kemiskinan

Adapun upaya-upaya dalam penanganan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah adalah :

1. Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga penerima manfaat yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH. Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan dan layanan pendidikan yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang distabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya.

2. Kartu Indonesia Pintar (KIP)

KIP sendiri merupakan kartu yang ditujukan bagi keluarga miskin dan rentan miskin yang ingin menyekolahkan anaknya yang berusia 7-18 tahun secara gratis. Mereka yang mendapat KIP ini akan diberikan dana tunai dari pemerintah secara reguler yang tersimpan dalam fungsi kartu KIP untuk bersekolah secara 30 gratis tanpa biaya. Program KIP sendiri akan ditujukan pada keluarga kurang mampu di seluruh Indonesia yang memiliki anak usia sekolah 7 hingga 18 tahun baik yang telah terdaftar maupun yang belum terdaftar di sekolah maupun madrasah

3. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Bantuan sosial yang disalurkan secara non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui uang elektronik selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan di e-Warong.

4. Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS)

Jamkesmas adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan hampir miskin. Tujuan Jamkesmas adalah meningkatkan akses terhadap masyarakat miskin dan hampir miskin agar dapat memperoleh pelayanan kesehatan. Pada saat ini Jamkesmas melayani 76,4 juta jiwa.

5. Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-Rutilahu)

RS-Rutilahu merupakan salah satu kegiatan penanganan fakir miskin yang diselenggarakan Kementerian Sosial dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas tempat tinggal fakir miskin melalui perbaikan/rehabilitasi kondisi rumah tidak layak huni dengan prioritas atap, lantai, dan dinding serta fasilitas MCK. RS-Rutilahu beranggotakan paling sedikit 5 (lima) dan paling banyak 15 (lima belas) Kepala keluarga untuk satu kelompok masyarakat miskin yang tinggal berdekatan. RS-Rutilahu dilaksanakan dalam satu kelompok dengan semangat kebersamaan, kegotongroyongan, dan nilai kesetiakawanan sosial masyarakat.

2.5 Tinjauan Teori Pekerjaan Sosial dalam Kemiskinan

Definisi pekerjaan sosial menurut Zastrow dalam Adi Fahrudin (2012:60) pekerjaan sosial merupakan kegiatan profesional untuk membantu individu-individu, kelompok atau masyarakat untuk meningkatkan atau memperbaiki kemampuan mereka dalam berfungsi sosial dan untuk menciptakan kondisi masyarakat yang memungkinkan mereka mencapai tujuan.

Pekerjaan Sosial memandang kemiskinan merupakan persoalan-persoalan yang multidimensional, yang bermantra ekonomi, sosial dan individual-struktural (Edi Suharto 2004). Adapun tiga kategori kemiskinan yang menjadi pusat perhatian pekerjaan sosial yaitu kelompok paling miskin, kelompok miskin dan kelompok rentan. Strategi penanganan kemiskinan pekerjaan sosial berfokus pada peningkatan kemampuan orang miskin dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya sesuai dengan statusnya, atau untuk meningkatkan keberfungsian orang miskin. Dalam praktiknya dengan kemiskinan pekerja sosial memiliki peran sebagai berikut:

1. *Broker* : Tujuan dari peran broker adalah untuk menghubungkan keluarga miskin dengan sumber daya yang ada dan dapat memenuhi kebutuhan mereka dengan sebaik- baiknya. Kinerja yang efektif dari peran ini membutuhkan pemahaman tentang kebutuhan dan sumber daya keluarga miskin.
2. *Enabler* : Dalam peran ini, pekerja sosial membantu memberdayakan keluarga miskin. Pekerja sosial membantu keluarga miskin dalam menyadari kekuatan internal dan mekanisme penanggulangan untuk memenuhi sasaran layanan. Elemen pembeda utama dari peran *enabler*

adalah bahwa perubahan berasal dari upaya keluarga miskin itu sendiri. Tanggung jawab pekerja sosial adalah untuk memfasilitasi kemajuan keluarga miskin dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan pekerja sosial termasuk mendukung keluarga miskin dalam upaya perubahan, berdiskusi dengan keluarga miskin mengenai konsekuensi dari keputusan mereka.

3. Advokat : Mirip dengan profesional hukum pada intinya, pekerja sosial mengambil sisi keluarga miskin dan menjadi juru bicara partisan. Advokat dapat berasal dari dalam suatu sistem maupun eksternal untuk suatu sistem.
4. *Teaching* atau mengajar Mengajar : berarti membantu orang untuk memperoleh pengetahuan baru. Tujuan dari peran ini adalah untuk membantu keluarga miskin membangun keterampilan tambahan dan sumber daya lainnya. Membantu keluarga miskin/KPM belajar, pekerja sosial dapat menggunakan teknik, seperti permodelan atau bermain peran. Mengajar melibatkan pemberian informasi, tidak selalu saran atau pendapat pekerja sosial.
5. Mediator : Dalam peran mediator, pekerja sosial mencoba menyelesaikan konflik antara keluarga miskin/KPM dengan sistem lain. Tidak seperti peran advokat, mediator tetap menjadi pihak ketiga yang netral dan tidak semata-mata memperdebatkan kasus keluarga miskin/KPM. Seorang mediator memantu mengklarifikasi masalah dan berusaha untuk menemukan suatu upaya-upaya penyelesaian pertengkaran. Usaha

kesejahteraan sosial berkaitan dengan sistem sumber. Sistem sumber merupakan bahan dasar yang dimanfaatkan dalam usaha kesejahteraan sosial.

Pekerja sosial dalam praktiknya memiliki metode diantaranya ada *case work*, *group work*, dan *community organization and community development*. Dalam penanganan kemiskinan, pekerja sosial bisa menggunakan metode *community development* (CD) yang merupakan upaya yang dilakukan oleh profesional dan penduduk setempat untuk meningkatkan ikatan sosial diantara anggota masyarakat, meningkatkan motivasi warga masyarakat agar mampu menolong diri mereka sendiri, mengembangkan tanggung jawab kepemimpinan lokal, dan menciptakan atau merevitalisasi institusi lokal.

Model dalam *Community Development* yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Locality Develepment*, model ini merupakan proses yang ditujukan untuk menciptakan kemajuan sosial dan ekonomi bagi masyarakat melalui partisipasi aktif serta inisiatif anggota masyarakat itu sendiri (*United Nation*, 1955 dalam Suharto, 1997:294). Anggota masyarakat dipandang bukan sebagai sistem klien yang bermasalah melainkan sebagai masyarakat yang unik dan memiliki potensi, hanya saja potensi tersebut belum sepenuhnya dikembangkan. Bertujuan untuk menolong masyarakat lokal dalam menemukan masalah, kebutuhan, potensi dan sumber-sumber, membuat rencana pembangunan dan mendampingi pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu tertentu hingga masyarakat mampu melakukannya sendiri.

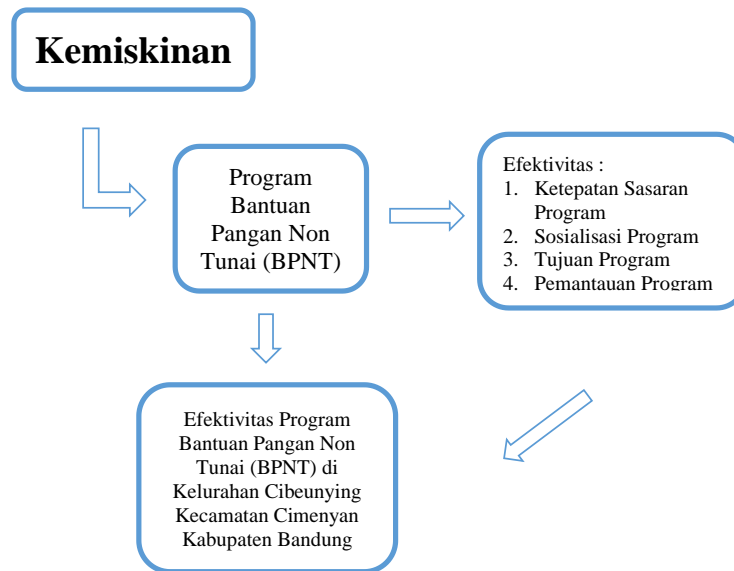
Peran peksos yang menonjol dari model ini yaitu enabler, mempercepat pencapaian hasil, coordinator, serta guru dalam meningkatkan keterampilan untuk memecahkan masalah serta dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan etik.

Teknik dan taktik dalam *Community Development* yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Sosialisasi : Teknik ini digunakan untuk memberikan/meningkatkan pengetahuan. Dengan menggunakan taktik pendidikan dan persuasi yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada kelompok sasaran. Persuasi untuk memberikan gambaran bahwa kegiatan yang dilakukan suatu kegiatan yang sangat bermanfaat.
- 2) Kolaborasi (Kerjasama) : Kolaborasi dilakukan apabila sistem sasaran setuju dengan sistem kegiatan mengenai perlunya perubahan dan dukungan alokasi sumber. Dengan cara membangun kapasitas (*capacity building*) yang dilakukan melalui Bimbingan Teknis dan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang berupaya untuk melibatkan anggota sistem klien dalam usaha perubahan.

2.6 Kerangka Pemikiran

Untuk memudahkan dalam memahami kerangka pikir penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut :



Bagan 2. 1 Kerangka Pemikiran

Sumber : Hasil Pemikiran Peneliti Tahun 2023

Kerangka pemikiran menurut Sugiyono (2014:95), merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kemiskinan merupakan kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dan hak-hak dasarnya. Pada dasarnya kemiskinan berhubungan dengan rendahnya penghasilan dan kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian adapun upaya dalam penanganan kemiskinan yang di lakukan pemerintah yang salah satunya ada dalam Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan Bantuan sosial yang disalurkan secara non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui uang elektronik selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan di e-Warong. Dan untuk mengukur tercapainya

tujuan program ini maka diharus diketahui efektivitasnya. Untuk mengukur efektivitas tersebut menggunakan aspek-aspek seperti Ketepatan Sasaran Program, Sosialisasi Program, Tujuan Program dan Pemantauan Program. Berdasarkan hal tersebut dapat di tarik kesimpulan dengan mengukur keefektivitasan melalui berbagai aspek tersebut bisa diketahui Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Cibeunying Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung.